

# **1 BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja . Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

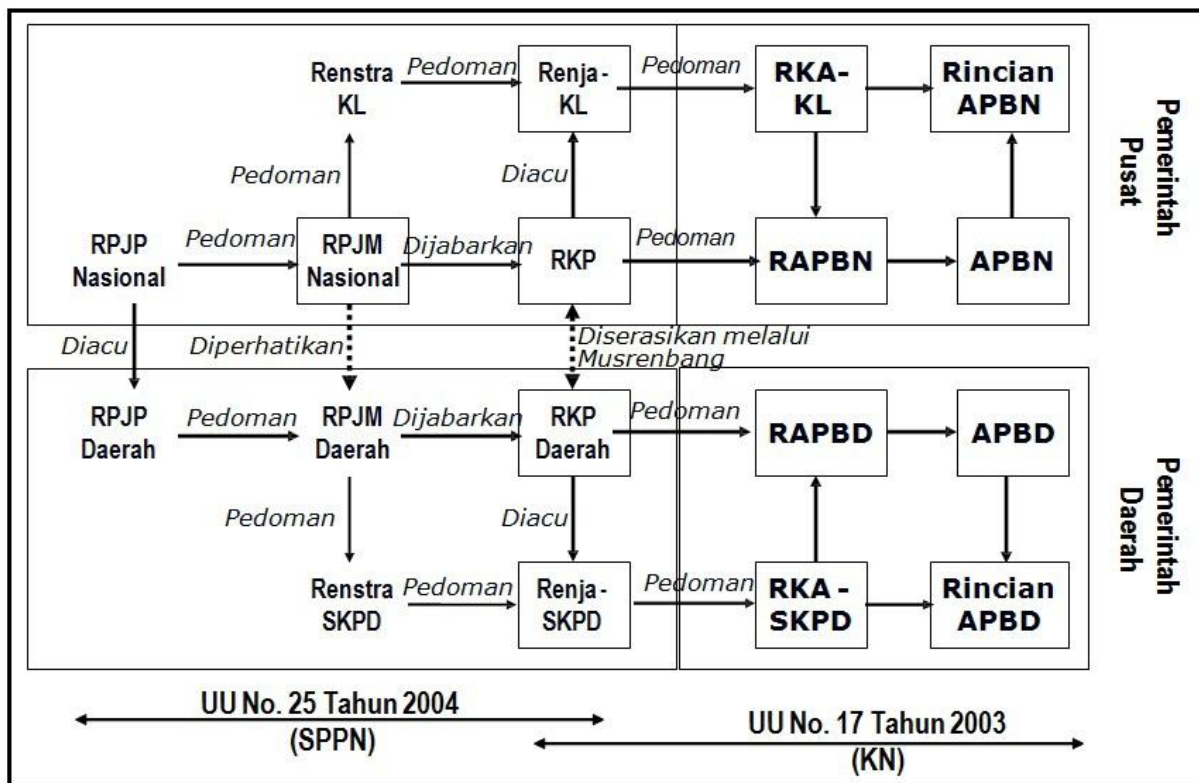
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ....\*\*) Nomor ....\*\*) Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- g. Peraturan Menteri ....\*\*) Nomor ....\*\*) Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kementerian ....\*\*) Tahun 2022; (agar diisikan dengan nama Kementerian yang terkait)
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. **Rancangan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026**
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul; dan

- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026;
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

## **2 BAB II.**

### **HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

## Catatan verif:

- Angka target dan realisasi agar dilengkapi dengan satuan
- Untuk Tahun 2021 nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan agar sesuai dengan yang dilaksanakan Tahun 2021 (APBD 2021)
- Setelah tabel tambahkan keterangan: Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	<b>Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</b>							
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Capaian Nilai AKIP</b>	83	83	98	85	85	100%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	6	6	100%	6	6	100%
		Jumlah Materai	1800	1800	100%	600	600	100%
		Jumlah honor pengelola keuangan dan barang	120	120	100%	120	120	100%
		Jumlah ATK	40	40	100%	40	40	100%
		Jumlah penggandaan	130.000	130.000	100%	130.000	130.000	100%
		Jumlah barang cetakan	33	33	100%	33	33	100%
		Jumlah pajak kendaraan	50	50	100%	50	50	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		dinas						
		Jumlah langganan surat kabar	12	12	100%	12	12	100%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	600	600	100%	600	600	100%
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	34	34	100%	34	34	100%
		Jumlah makan minum rapat	4140	4140	100%	3521	3521	100%
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan tenaga pramubhakti	232	232	100%	232	232	100%
		Jumlah honorarium tenaga pramubhakti	80	80	100%	80	80	100%
		Jumlah honorarium tenaga Kebersihan	22	22	100%	22	22	100%
		Jumlah premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan tenaga kebersihan	2	2	100%	2	2	100%
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana</b>	90	90	100%	90	90	100%
	Pembangunan / Rehabilitasi rumah dan gedung kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor	1	1	100%	1	1	100%
	Pengadaan / Rehabilitasi Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	0	0	0	0	0	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	6	6	100%	6	6	100%
	Pemereliharaan rumah dan Gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor	1	1	100%	1	1	100%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pembiayaan suku cadang kendaraan dinas/operasional	50	50	100%	52	52	100%
		Jumlah pembiayaan bbm/oli kendaraandinas/operasional	18750	18750	100%	18750	18750	100%
		Jumlah service kendaraan dinas/operasional	50	50	100%	52	52	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	7	7	100%	7	7	100%
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase pelanggaran disiplin pegawai</b>	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	jumlah pengadaan seragam	232	232	100%	232	232	100%
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	232	232	100%	232	232	100%
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pelaksanaan kesamptaan	48	48	100%	48	48	100%
		Jumlah Pelaksanaan KOrsik	48	48	100%	48	48	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	78	78	100%	79	79	100%
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Dokumen perencanaan	3	3	100%	3	3	100%
	Penyusunan laporan Capaian kinerja keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen Laporan	4	4	100%	4	4	100%
	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Rasio LINMAS terhadap RT</b>	100	100	100%	100	100	100%
	Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	850	850	100%	850	850	100%
		Penyuluhan Bina Masyarakat	960	960	100%	0	0	0
		Pelatihan Ketrampilan						
		Penyelamatan (rescue) Linmas	150	150	100%	150	150	100%
	Pemberdayaan Linmas	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1182	1182	100%	1182	1182	100%
		Apel Siaga Linmas	475	475	100%	475	475	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pemberdayaan FKDM dan Linmas	600	600	100%	600	600	100%
		Peringatan Hut Satpol PP dan Linmas	1.400	1.400	100%	1.400	1.400	100%
	<b>Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>Cakupan pelanggaran kanrantibmas yang Ditindaklanjuti</b>	100	100	100%	100	100	100%
	Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah	Jumlah operasi pengamanan dan patroli wilayah	924	924	100%	924	924	100%
	<b>Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan</b>	<b>Cakupan kawasan tertib</b>	18	18	100%	18	18	100%
	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat	2200	2200	100%	2200	2200	100%
		Kerjasama pengembangan kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI, Polri dan Kejaksaan						
		Penertiban	2800	2800	100%	2800	2800	100%
		Peningkatan Kkerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	600	600	100%	100	100	100%
		Operasi Gabungan	1300	1300	100%	1300	1300	100%
		Pembinaan Satuan	156	156	100%	100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Keamanan Lingkungan						
		Penanganan Konflik	2000	2000	100%	2000	2000	100%
		Sosialisasi Pedukuhan Sapta Tertib	200	200	100%	200	200	100%
		Safari Kantrantibmas	200	200	100%	100	100	100%
	<b>Program Penegakan Perda</b>	<b>Cakupan Pelanggaran Perda yang ditindak</b>	100	100	100%	100	100	100%
	Operasi Penegakan Perda	Operasi yustisi dan non Yustisi	120	120	100%	120	120	100%
	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Mirasdan	300	300	100%	300	300	100%
		Narkoba						
		Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	200	200	100%	100	100	100%
		Workshop Pengembangan Kapasitas PPNS dan Trantib	100	100	100%	100	100	100%
		Pengkajian Perda	50	50	100%	50	50	100%

Sumber : Sat Pol PP 2019

Keterangan: Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2020 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

Catatan verif: Masih ditemukan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan yang digunakan adalah nomenklatur Tahun 2021. Seharusnya tabel ini menjelaskan program/kegiatan Tahun 2020 yang kinerjanya tidak tercapai dan faktor penghambat yang menyebabkan kinerja program/kegiatan tidak tercapai. Agar disesuaikan kembali.

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program penunjang urusan pemerintahan	Situsi pandemi covid-19 sehingga di lakukan refocusing untuk penanganan covid-19
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	
	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	
2.	Program penunjang urusan pemerintahan	Situsi pandemi covid-19 sehingga di lakukan refocusing untuk penanganan covid-19
	kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	
	sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang  
Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Catatan verif: Masih ditemukan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan yang digunakan adalah nomenklatur Tahun 2021. Seharusnya tabel ini menjelaskan program/kegiatan Tahun 2020 yang kinerjanya tercapai dan faktor pendukung yang menyebabkan kinerja program/kegiatan dapat tercapai (bukan ketersediaan anggaran dan sdm). Agar disesuaikan kembali.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketersediaan anggaran dan sdm
	Kegiatan perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja perangkat	
	sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
	sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketersediaan anggaran dan sdm
	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	
	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan	
	Sub kegiatan pelaksanaan penataan usaha dan pengkajian/verifikasi keuangan spd	
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketersediaan anggaran dan sdm
	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	
	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas serta atribut kelengkapannya	
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketersediaan anggaran dan sdm
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketersediaan anggaran dan sdm

	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
	Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketersediaan penganggaran dan sdm
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendarann dinas oprasional atau lapangan	
	Sub kegiatan pemeliharaan mesin lainnya	
	Sub kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi saran dan prasana Gedung kantor atau bangunan lainnya	
2	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Ketersediaan penagnggaran dan sdm
	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	
	Sub kegiatan penjegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan dan pengawalan	
	Sub kegiatan penindakan atas gangguan trantibum bedasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan pegamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa	
	Sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka trantibum	
	Sub kegiatan peningkatan kapasistas sdm satpol pp dan linmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	
	Sub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana trantibum	
	Kegiatan penegakan perda	
	Sub kegiatan pengawasan	



	atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda	
	Sub kegiatan penengangan atas pelanggaran Perda	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2022 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi laporan data tepat waktu
2. Optimalisasi dukungan kegiatan bidang linmas tibum dan garda untuk kelengkapan sarana dan prasarana
3. Optimalisasi personil/sdm yang memadai
4. Kajian penyempurnaan Perda
5. Sinergitas opd dan stakeholder terkait

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:





Sesuai pencapaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:

- a. Nihil (memenuhi target)
- b. dst

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. nihil (memenuhi target)
- b. dst

2. IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:

- a. Presentase penegakan Perda
- b. Presentase penyelesaian pelanggaran trantibum

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Nihil (memenuhi target) → catatan verif: faktor pendukungnya apa? Agar dijelaskan
- b. ....
- c. Dst

Catatan verif:

- Agar dijelaskan IKU mana yang tidak tercapai, dan beri penjelasan faktor penyebab IKU tidak tercapai (penjelasan faktor penyebab tidak tercapai bukan diisi nihil)
- Agar dijelaskan IKU mana yang tercapai, dan beri penjelasan faktor pendukung pencapaian IKU (faktor pendukung bukan diisi nihil)

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Catatan verif: Pernyataan kekuatan dan kelemahan agar dicermati kembali dan disesuaikan. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal yang berpengaruh pada kinerja Satpol PP.

- Kekuatan: faktor didalam lingkungan Satpol PP yang dapat memberikan manfaat pada pencapaian kinerja Satpol PP
- Kelemahan: faktor didalam lingkungan Satpol PP yang dapat menghalangi pencapaian kinerja Satpol PP

Kekuatan	Kelemahan
<p>1. Belum optimalnya penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Catatan verif: pernyataan ini merupakan kondisi negatif, sehingga kurang tepat bila dijadikan kekuatan. Agar disesuaikan kembali.</p>	<p>1. Adanya kegiatan yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum yang tidak dilaporkan/ dikoordinasikan</p> <p>Catatan verif: pernyataan ini merupakan faktor eksternal. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal yang berpengaruh pada kinerja Satpol PP. Agar disesuaikan kembali.</p>
<p>2. Adanya pelanggaran Perda</p> <p>Catatan verif: pernyataan ini merupakan kondisi negatif, sehingga kurang tepat bila dijadikan kekuatan. Agar disesuaikan kembali.</p>	<p>2. Kurangnya kesadaran kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan</p> <p>Catatan verif: pernyataan ini merupakan faktor eksternal. Seharusnya Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal yang berpengaruh pada kinerja Satpol PP. Agar disesuaikan kembali.</p>

Selain itu, selama Tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Catatan verif: Pernyataan peluang dan tantangan agar dicermati kembali dan disesuaikan. Peluang dan tantangan merupakan faktor eksternal yang berpengaruh pada kinerja Satpol PP.

- Peluang: faktor dilur lingkungan Satpol PP yang dapat memberikan manfaat pada pencapaian kinerja Satpol PP
- Tantangan: faktor diluar lingkungan Satpol PP yang dapat menghalangi pencapaian kinerja Satpol PP

Peluang	Tantangan
1. Dinamika perkembangan produk hukum Daerah	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan Perda
2. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban ketentraman Umum	2. Adanya kondite negative yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Satpol PP
3. Perkembangan pembangunan di Kab. Bantul	3. Banyaknya jumlah penduduk Angkatan kerja yang berpotensi melakukan pelanggaran Perda

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dirancang kegiatan diklat yang berkaitan dengan kompetensi satpol pp seperti diklat dasar yang di amanatkan oleh peraturan pemerintah NO.6 tahun 2010 tentang satpol pp. Adapun macam diklat yang antara lain diklat intel, diklat provos, dan jabatan profesional
2. Perlu kordinasi yang lebih intensif dengan opd terkait sehingga pelanggaran-pelanggaran bisa di antisipasi sejak awal
3. Komitmen pemerintah dalam upaya menjaga trantibum dan upaya penanganan penyelesaian pelanggaran trantibum

Catatan verif: Sebaiknya strategi yang akan ditempuh Tahun 2022 memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang telah diidentifikasi dan disajikan pada table sebelumnya.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program penunjang urusan pemerintahan					Program penunjang urusan pemerintahan					
1.1	Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					
	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan	Kab.bantul	Capaian nilai evaluasi kinerja	79	Rp. 6.877.500	<b>Program Pelayanan administrasi Perkantoran</b>	Kab. Bantul	<b>Nilai AKIP</b>	79	Rp. 7.000.000	
	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab.bantul	Capaian nilai evaluasi kinerja	79	Rp. 18.525.000	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab.bantul	Capaian nilai evaluasi kinerja	79	Rp. 18.525.000	
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kab.bantul				Administrasi keuangan perangkat daerah	Kab.bantul				
	Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN			12 bulan	Rp. 6.827.602.378	Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN			12 bulan	Rp. 6.827.602.378	
	Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi	Kab.bantul		12 laporan keuangan	Rp. 1.671.643.200	Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi	Kab.bantul		12 laporan keuangan	Rp. 1.671.643.200	

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	keuangan SKDP										
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah					Administrasi kepegawaian perangkat daerah					
	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Pakaian kinerja personil		Rp. 117.175.000	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Pakaian kinerja personil		Rp. 117.175.000	
	Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab.bantul		235 orang	Rp. 99.900.000	Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab.bantul		235 orang	Rp. 99.900.000	
	Administrasi umum perangkat daerah					Administrasi umum perangkat daerah					
	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	Rp. 102.925.646	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	Rp. 102.925.646	
	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKDP	Kab.bantul		12 dokumen	Rp. 163.016.500	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKDP	Kab.bantul		12 dokumen	Rp. 163.016.500	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		Jasa perbaikan perlatan dan perbaikan kantor	5 jenis	Rp. 305.599.750	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		Jasa perbaikan perlatan dan perbaikan kantor	5 jenis	Rp. 305.599.750	
	Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor					Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor					



No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Bahanbakar minyak	35.200 liter	Rp. 491.170.912	Sub kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Bahanbakar minyak	35.200 liter	Rp. 491.170.912	
	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan					Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan					
	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.bantul	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 unit	Rp. 18.197.772	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.bantu	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 unit	Rp. 18.197.772	
	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab.bantul	Pemeliharaan Gedung kantor	1 unit	Rp. 15.000.000	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab.bantu	Pemeliharaan Gedung kantor	1 unit	Rp. 15.000.000	
	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum					Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum					
	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota					Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota					
	Kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegh dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan		Patrol kewilayahan	288 kali	Rp. 1.104.513.750	Kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegh dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan		Patrol kewilayahan	288 kali	Rp. 1.104.513.750	

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa		Review sop dalam penanganan trantibum	1 dokumen	Rp. 338.476.800	Sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa		Review sop dalam penanganan trantibum	1 dokumen	Rp. 338.476.800	
	Sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum		Satlinmas yang terlatih dan di kukuhkan	100 orang	Rp. 366.864.300	Sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum		Satlinmas yang terlatih dan di kukuhkan	100 orang	Rp. 366.864.300	
	Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bedasarkan hak asasi manusia		Peningkatan pemahaman peserta pelatihan sebesar 90% dari 2.550 orang	2.550 orang	Rp. 93.845.000	Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bedasarkan hak asasi manusia		Peningkatan pemahaman peserta pelatihan sebesar 90% dari 2.550 orang	2.550 orang	Rp. 93.845.000	
	Sub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum		Presentase pemenuhan spras minimal trantibum	100%	Rp. 13.335.750	Sub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum		Presentase pemenuhan spras minimal trantibum	100%	Rp. 13.335.750	
	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota					Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota					
	Kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota		Riview sop dalam penegakan perba dan perkada	1 dokumen	Rp. 92.055.000	Kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota		Riview sop dalam penegakan perba dan perkada	1 dokumen	Rp. 92.055.000	

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub kegiatan Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota		Laporan yustisi dan non yustisi	4 laporan	Rp. 31.4911.800	Sub kegiatan Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota		Laporan yustisi dan non yustisi	4 laporan	Rp. 31.4911.800	
JUMLAH					Rp. 12.161.636.058		JUMLAH			Rp. 12.161.636.058	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

## 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2022, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2022 adalah "....." dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022

Catatan verif: Prioritas nasional dan Program prioritas merupakan prioritas nasional dan program prioritas yang ditetapkan dalam RKP. Agar disesuaikan

Prioritas Nasional	Program Prioritas
Stabilitas polhubhankam dan transformasi pelayanan public	

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Stabilitas polhubhankam dan transformasi pelayanan public
2. Pemenuhan kualitas pelayanan public

Catatan verif: seharusnya ditulis dengan kebijakan kementerian terkait Tahun 2022. Agar disesuaikan.

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri maka kebijakan dan langkah strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen pemerintah terhadap penegakan Perda
2. Implementasi penegakan perda dengan melibatkan stakeholder
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah "Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat;
2. Penguatan Produk Unggulan pada Sektor Unggulan;
3. Pemantapan Infrastruktur Pendukung;
4. Pemantapan Sistem Layanan Sosial dan Bencana.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
	Terwujudnya kesadaran masyarakat, untuk mematuhi dan	Meningkatnya impelementasi Perda	Presentase penegakan Perda	100%

	taat pada peraturan daerah kabupaten bantul			
			Presentase penanganan trantibum yang di tindak lanjuti	100%

Catatan verif: Agar disesuaikan dengan Rancangan Awal RMPJD dan Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026

#### **4 BAB IV.**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.08 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan Hasil Rapat laporan SPPD Dalam daerah laporan SPPD Luar Daerah	48 dokumen 12 dokumen 2 dokumen			48 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	117,716,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya ketentrangan dan ketertiban masyarakat	48 dokumen 12 dokumen 2 dokumen	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						353,503,862							350,000,000	
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis			5 Jenis	353,503,862	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya ketentrangan dan ketertiban umum	5 Jenis	350,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						442,237,250							535,000,000	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas	52 unit			52 unit	412,270,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya ketentrangan dan ketertiban masyarakat	52 unit	500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan mesin	5 jenis			5 jenis	12,700,000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya ketentrangan dan ketertiban masyarakat	5 jenis	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor	1 unit			1 unit	17,267,250	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya ketentrangan dan ketertiban masyarakat	1 unit	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen		Persen	100Persen	2,384,412,280						100 Persen	3,400,000,000	
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran kant rantibmas yang ditindaklanjuti	persen		persen	100persen	1,922,692,980						100 persen	2,925,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
TOTAL						10,016,231,291						13,682,000,000			

## **5 BAB V.**

### **PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH